



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 13 Maret 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

UNIT KERJA : UNIVERSITAS JEMBER

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **ESTI UTARTI**
2. Jabatan : **WAKIL DEKAN BIDANG KEUANGAN DAN UMUM**
3. NHK : **1009817**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 9.000.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 198 m2/290 m2 di KAB / KOTA JEMBER, HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 320 m2/640 m2 di KAB / KOTA JEMBER, HASIL SENDIRI Rp. 2.500.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 360 m2/200 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 5.500.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 350.500.000**

1. MOBIL, NISSAN MINIBUS Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
2. MOTOR, HONDA NC 110D VARIO Tahun 2006, HASIL SENDIRI Rp. 500.000
3. MOBIL, NISSAN X TRAIL 2.0 AT Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
4. MOTOR, VESPA PRIMAVERA Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp. ----**

D. SURAT BERHARGA **Rp. 1.000.000.000**

E. KAS DAN SETARA KAS **Rp. 2.107.262.579**

F. HARTA LAINNYA **Rp. ----**

Sub Total **Rp. 12.457.762.579**



III. HUTANG

Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 12.457.762.579

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.